



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 03 Desember 2018

Halaman: 2

PENANGANAN RTLH BERSINERGI DENGAN KOTA TANPA KUMUH

Dana Bantuan Perbaikan Lebih Besar

PAKUALAMAN (MERAPI) - Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Yogyakarta kini bersinergi dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dan pihak swasta. Lewat sinergi tersebut, dana bantuan untuk perbaikan RTLH bisa lebih besar dari sebelumnya Rp 15 juta meningkat hingga Rp 100 juta.

Menurut Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, dengan penanganan secara bersinergi itu, bantuan untuk perbaikan RTLH bisa lebih besar. Dana perbaikan RTLH dari APBD Kota Yogyakarta hanya sekitar Rp 15 juta tiap rumah. Sedangkan melalui sinergi dengan Kotaku dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) itu, satu rumah dapat memperoleh dana Rp 94 juta sampai Rp 100 juta. Total dana penanganan untuk 14 RTLH di Purwokinanti mencapai sekitar Rp 1 miliar. Ada 14 RTLH di RW 01 Purwokinanti Pakualaman yang menjadi percontohan penanganan dengan program bersinergi itu.

"Dana yang digulirkan jauh lebih besar dibanding perbaikan RTLH yang didanai APBD. Saya optimis masyarakat bisa memberikan bukti dalam penggunaan dana perbaikan RTLH," kata Haryadi di sela penyerahan proposal perbaikan RTLH di kantor Kelurahan Purwokinanti, Sabtu (1/12).

RTLH di RW 01 Purwokinanti semuanya berada di bantaran Sungai Code Kampung Jagalan. Perbaikan pembangunan berupa fondasi, struktur, atap, lantai, dinding dan kamar mandi. Pembangunan juga disesuaikan dengan parameter program Kotaku di antaranya kondisi drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran.

Ditegaskan pihaknya akan ikut memantau penggunaan dana perbaikan RTLH itu. Masyarakat diminta menggunakan dana perbaikan RTLH itu sesuai peruntukannya. Penggunaan dana yang sesuai dan hasil maksimal, lanjutnya, memungkinkan sinergi program itu bisa diadakan kembali di Kota Yogyakarta di wilayah lain.

"Harapannya tidak hanya di Purwokinanti, tapi juga daerah lain. Dengan kemampuan APBD yang terbatas, lewat sinergi program dari pemerintah pusat ini kemampuan dana lebih besar dan perbaikan bisa maksimal sesuai kebutuhan," pesannya.

Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo mengatakan, tahun ini pihaknya sudah mengucurkan dana Rp 45 triliun untuk membangun 745.000 unit rumah di seluruh Indonesia. Perusahaan itu menamakan saham di Kementerian Keuangan. Dalam penanganan RTLH di Purwokinanti itu PT SMF bekerja sama dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Ini adalah percontohan pertama penanganan RTLH yang bersinergi. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah sasarnya," tambah Ananta.

Sebelumnya Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Yunita Rahmi Hapsari menjelaskan pada tahun 2018 total ada sekitar 502 RTLH yang diperbaiki dan tersebar di berbagai kelurahan di Kota Yogyakarta. Rinciannya sebanyak 207 RTLH Kelurahan Muja Muja, Sorosutan, Bener dan Tegalrejo dengan Dana Alokasi Khusus APBN.

Sedangkan Pemda DIY akan menangani 203 RTLH di berbagai kelurahan dan APBD Kota Yogyakarta 92 RTLH Kelurahan Patangpuluhan, Pakuncen, Notoprayan dan Rejowinangun.

Dengan perbaikan sejumlah RTLH di tahun 2018 maka menyisakan 2.133 RTLH di Kota Yogyakarta yang belum ditangani. Dia menambahkan untuk RTLH tahun 2019 akan mengusulkan perbaikan 200 RTLH dengan APBD Yogyakarta, 60 RTLH diusulkan menggunakan APBD DIY dan 220 RTLH ke Kementerian Pekerjaan Umum. (Tel)-m

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Badan Perencanaan Pembangunan | Positif | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas PUPKP | | | |

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005